

## **Membincang Pembubaran Front Pembela Islam dalam *Framing* Pemberitaan *Republika.co.id***

**Fiiki Ridho Rabbina**

UIN Syarif Hidayatulah Jakarta  
fiiki.rabbina17@mhs.uinjkt.ac.id

**Ali Irfani**

UIN Syarif Hidayatulah Jakarta  
ali.irfani@uinjkt.ac.id,

### **Abstract**

The Indonesian government's decision to dissolve the *Front Pembela Islam* (FPI) has sparked controversy. *Republika.co.id* is one of the online media that intensively reported on the disbandment of FPI three days after the government's decision was delivered, which was to release 47 stories on its online site. This article aims to find out how the *Republika.co.id* media framed the issue concerning the history of *Republika* as a media that was created by the Indonesian Muslim Intellectuals Association (ICMI), one of the famous Islamic groups in Indonesia. In addition, this article also analyzes how media framing is related to media ownership to see the media's alignment with power. This article uses framing analysis by Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki to determine how the text strategy of media builds frames. The results show that the *Republika.co.id* remains critical of the government's policy of disbanding FPI as an organization even though the media owners are part of the government.

**Keyword—Framing, Online Media, FPI, *Republika.co.id***

### **Abstrak**

Keputusan pemerintah Indonesia membubarkan Front Pembela Islam (FPI) menuai pro-kontra di tengah masyarakat. *Republika.co.id* merupakan salah satu media yang intensif memberitakan pembubaran FPI tiga hari setelah keputusan pemerintah disampaikan, yaitu merilis sebanyak 47 berita pada situs onlinenya. Artikel ini bertujuan menemukan bagaimana media *republika.co.id* mbingkai isu tersebut terkait dengan sejarah *Republika* yang lahir dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, salah satu organisasi islam terkenal di Indoonesia. Selain itu, artikel ini juga menelaah frame media dari aspek kepemilikan media untuk melihat keberpihakan media pada kekuasaan. Artikel ini menggunakan analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk menemukan bagaimana strategi teks media dalam membangun frame. Hasilnya menunjukkan bahwa media *Republika.co.id* tetap bersikap kritis terhadap kebijakan

pemerintah dalam pembubaran FPI sebagai organisasi meskipun pemilik media merupakan bagian dari pemerintah.

**Keyword—***Analisis Framing, Media Online, FPI, Republika.co.id*

**Permalink/DOI:** <https://doi.org/10.15408/jsj.v4i1.25850>

## A. PENDAHULUAN

Organisasi masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) ramai diberitakan di media massa pada akhir tahun 2020. Ormas Islam ini tak henti-hentinya menjadi perbincangan publik sejak kepulangan pimpinan FPI, Muhammad Rizieq Shihab pada November 2020.

Kepulangan Habib Rizieq dari Saudi Arabia ke tanah air disambut ribuan massa FPI yang diduga mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Tak berhenti disitu FPI kemudian mengadakan acara maulid nabi di Petamburan yang dihadiri ribuan jamaah serta menggelar acara pernikahan di masa pandemi Covid-19.

Sebulan setelah kerumunan tersebut, terjadi insiden penembakan 6 laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek, hingga penangkapan Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Megamendung-Petamburan dan berujung pada pembubaran FPI.

Organisasi FPI secara resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al-Um Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. FPI didirikan oleh sejumlah habaib, ulama, mubaligh serta aktivis muslim dan umat Islam.<sup>1</sup>

Tujuan berdirinya FPI sebagaimana tertulis dalam dokumen risalah dan garis perjuangan FPI, adalah untuk melakukan *amar makruf nahi munkar*, dan membantu pemerintah dalam menumpas problem sosial kemasyarakatan, seperti prostitusi, perjudian, serta transaksi miras dan narkoba.<sup>2</sup> Akan tetapi, gerakan dakwah yang dilakukan oleh FPI sering menimbulkan kontroversi karena dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai tindakan anarkis yang berujung pada kekerasan.

Pembubaran FPI berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tentang organisasi kemasyarakatan menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Dengan keputusan tersebut banyak pihak yang menilai pemerintah otoriter karena membubarkan ormas tanpa peradilan.

Koalisi masyarakat sipil yang merupakan lembaga non pemerintah menilai larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut FPI bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul.<sup>3</sup> Sementara itu Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Marsudi Syuhud menilai Pembubaran FPI sudah tepat karena sudah tidak lagi memiliki legal *standing* dan ideologi FPI dianggap bersebrangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Machfud Syaefudin, "Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam", Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 34 No.2, (Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2014), h.261

<sup>2</sup> Machfud Syaefudin, "Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam", Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 34 No.2, (Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2014), h.261

<sup>3</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/285728/13/pembubaran-fpi-dinilai-bertentangan-dengan-prinsip-negara-hukum-1609366320> diakses pada 25 Juni 2021 pukul 14.30 WIB

<sup>4</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/287240/13/pandangan-pbnu-terkait-langkah-pemerintah->

Informasi terkait pembubaran FPI marak diberitakan di media massa, tak hanya media dalam negeri, ternyata keputusan pemerintah membubarkan FPI turut mendapat sorotan dari media asing.

Sejumlah media asing seperti *The Strait Times*, *The Star*, *Channel News Asia*, *Nikkei Asia*, *Deutsche Welle (DW)*, *Aljazeera*, *New York Times*, *Reuters*, hingga media Israel *Hayom* turut mewartakan peristiwa tersebut.

Informasi pembubaran FPI menjadi *Headline* hampir diseluruh media massa nasional baik cetak maupun *online*. Salah satu media *online* yang banyak memberitakan mengenai pembubaran Front Pembela Islam ialah *Republika.co.id*. Dalam kurun waktu satu minggu *Republika.co.id* merilis sebanyak 58 berita mengenai pembubaran FPI.

Banyaknya pemberitaan mengenai pembubaran Front Pembela Islam dapat mengisyaratkan bahwa *Republika.co.id* menganggap penting pemberitaan tersebut. Penonjolan yang dilakukan oleh *Republika.co.id* dalam peristiwa pembubaran FPI merupakan cara media untuk membentuk *frame* atas peristiwa tersebut.

Pemilihan media *online* *Republika.co.id* dalam penelitian ini menjadi menarik karena isu pembubaran FPI terkait dengan kelompok beragama Islam, di mana media *online* *Republika.co.id* juga dikenal sebagai media berideologi Islam.<sup>5</sup>

Media ini dibentuk atas cita-cita para cendekiawan muslim se-Indonesia yang berkumpul dalam Organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI). Nugroho,

---

[bubarkan-fpi-1609491714](https://www.republika.co.id/berita/indonesia/1609491714) diakses pada 19 Juli 2021 pukul 13.29 WIB

<sup>5</sup> *Company Profile*, Pusat Data Harian Umum Republika, h.1

<sup>6</sup> Yanuar Nugroho, d.k.k, "Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di

Indonesi" melalui laporan penelitiannya, mengatakan bahwa *Republika* merupakan media pertama yang ingin mengakomodir aspirasi komunitas muslim di Indonesia.<sup>6</sup>

Media *Republika* juga menampung aspirasi ormas Islam secara organisasi maupun perorangan, serta aspirasi wartawan dan para petinggi yang berafiliasi dengan ICMI. Oleh karena itu *Republika.co.id* tentu memiliki *frame* tersendiri terhadap peristiwa pembubaran Ormas FPI.

Pada awal mula berdiri *Republika* terbit di bawah bendera perusahaan PT Abadi Bangsa. Pada akhir tahun 2000, setelah Habibie tidak lagi menjabat sebagai presiden RI, kiprah politik ICMI selaku pemegang saham mayoritas koran ini mulai surut. Hal ini mengakibatkan dibelinya saham *Republika* oleh kelompok Mahaka Media milik keluarga Erick Tohir.<sup>7</sup>

Pemegang saham terbesar *Republika* saat ini adalah Erick Tohir yang menjabat sebagai menteri BUMN. Erick Tohir bergabung bersama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sementara FPI merupakan ormas yang seringkali "beroposisi" dengan pemerintah.

Oleh karena itu, penulis ingin melihat apakah kepemilikan saham mempengaruhi sikap *Republika* dalam memberitakan pembubaran FPI atau *Republika* masih memegang prinsip awalnya untuk menyalurkan aspirasi ormas Islam di Indonesia.

Eryanto dalam bukunya yang berjudul analisis *framing* menyebutkan bahwa media merupakan agen konstruksi, sebuah berita yang dipublikasikan tidak hanya

*Indonesia*", (Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance, Maret 2012), h.47

<sup>7</sup> Launa, *Robert Framing Analysis of Prabowo Subianto's Image in Republika.co.id March-April 2019 Edition*, Jurnal Vol.3 No.1 (Jakarta: Universitas Sahid Jakarta, 2020), h.55

menjelaskan realitas dan menunjukkan pandangan sumber berita, melainkan konstruksi dari media itu sendiri.

Media menyeleksi realitas mana yang dipilih dan mana yang tidak dipilih.<sup>8</sup> Hal ini berarti, pemberitaan pembubaran FPI bukan sekadar hasil proses liputan wartawan di lapangan, tetapi konstruksi media *Republika.co.id* terhadap peristiwa tersebut.

Untuk itu, penulis menggunakan analisis *framing* guna mengetahui “aturan dan norma” yang terdapat di balik teks. Analisis *framing* digunakan untuk mengetahui sudut pandang yang digunakan media dalam mengkonstruksi sebuah peristiwa. Teknik ini dapat menggambarkan cara suatu pesan diorganisir, digunakan, dan dipahami secara lebih mendalam.<sup>9</sup>

## B. Metodologi Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini ialah konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkan. Paradigma ini melihat fakta atau realitas sebagai hasil konstruksi dan bersifat subjektif.<sup>10</sup>

Dalam paradigma konstruktivis, realitas adalah konstruksi sosial yang dibuat oleh individu ataupun kelompok. Meskipun begitu, kebenaran realitas sosial itu relatif dan berlaku pada konteks

spesifik yang dianggap relevan oleh aktor sosial.<sup>11</sup>

Pemberitaan mengenai pembubaran FPI merupakan hasil konstruksi wartawan berdasarkan ideologi media masing-masing, mulai dari pemilihan fakta, narasumber, penggunaan kata, pemilihan gambar, hingga penyuntingan.

Pendekatan penelitian ini ialah kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode.<sup>12</sup>

Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive* dan *snowball*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi atau gabungan dengan analisis data bersifat induktif, hasil penelitian lebih berfokus pada makna daripada generalisasi.<sup>13</sup>

Subjek dalam penelitian ini adalah *Republika.co.id* sebagai penyampai berita, yaitu teks pemberitaan pembubaran FPI di media online *Republika.co.id* pada tanggal 30 Desember 2020-1 Januari 2021.

Tempat penelitian dilakukan di kantor redaksi *Republika.co.id* yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya No. 37 Jakarta Selatan. Adapun waktu penelitian terhitung dari bulan Agustus sampai Desember 2021.

---

<sup>8</sup> Eriyanto, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media* (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2011), h.25

<sup>9</sup> Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional, *Analisis Pemberitaan Media*, Oktober 2016, h.23

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h.204

<sup>11</sup> Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan*

*Televisi, dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), h.11

<sup>12</sup> Albito Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 7

<sup>13</sup> Albito Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8

Peneliti mengamati teks pemberitaan pembubaran FPI di media online *Republika.co.id* pada tanggal 30 Desember 2020-1 Januari 2021. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dari berbagai sumber lain yang terkait. Dokumen penelitian lainnya diperoleh melalui buku, jurnal, internet serta kajian-kajian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan redaktur *Republika.co.id*. Metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai pemberitaan pembubaran FPI yang ditulis oleh *Republika.co.id*.

#### Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan menggunakan metode analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Analisis *framing* secara sederhana dapat diartikan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media.<sup>14</sup>

Table 1. Skema Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

Struktur	Perangkat Framing	Unit yang Diamati
Sintaksis: Cara wartawan menyusun Fakta	1. Skema berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup
Skrip: Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan berita	5W+1H
Tematik: Cara wartawan	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk Kalimat	Paragraf, proposisi, kalimat,

<sup>14</sup> Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKis, 2012), h.3

menulis fakta	6. Kata Ganti	hubungan antar kalimat
Retoris: Cara wartawan menekankan fakta	7. Leksikon 8. Grafis 9. Metafora	Kata, Idiom, gambar/ foto, grafik

### C. Hasil Penelitian

1. Analisis Berita 1, “Pemerintah Bubarkan FPI dan Dilarang Beraktivitas”, (30 Desember 2020)

#### Stuktur-Sintaksis

Pada judul ini *Republika* terlihat tidak memihak kepada pemerintah ataupun FPI terkait dengan pembubaran dan pelarangan ormas FPI. Judul tersebut terlihat sekedar menginformasikan kepada khalayak bahwa pemerintah baru saja membubarkan dan melarang aktivitas FPI.

Pada *Lead Republika* terlihat bersikap netral, karena informasi yang diberikan *Republika* sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Mahfud MD, pada saat melakukan konferensi pers. *Republika* tidak mencampurkan antara opini wartawan dan fakta yang terjadi di lapangan.

Latar informasi yang digunakan *Republika* menggunakan pernyataan dari Mahfud MD. Latar informasi tersebut menjelaskan alasan pemerintah membubarkan FPI, yaitu karena FPI tidak lagi memiliki *legal standing*, baik sebagai organisasi masyarakat ataupun organisasi biasa.

Pada berita tersebut *Republika.co.id* menulis dua kutipan. Kedua kutipan menjelaskan alasan pemerintah membubarkan FPI. Dari sini dapat terlihat bahwa *Republika* tidak menerapkan

prinsip *cover bothside*, karena hanya menampilkan pernyataan dari Mahfud MD sebagai pemerintah.

Pernyataan yang dikutip *Republika* dalam *teks* menekankan pada tanggal pembubaran FPI. Mahfud MD menjelaskan bahwa sejak tanggal 23 Desember 2014 berdasarkan putusan MK Nomor 82 PUU 11 Tahun 2013 FPI sudah tidak lagi memiliki kedudukan hukum.

*Republika* menutup pemberitaan dengan pernyataan Mahfud MD, yang menekankan bahwa keputusan pemerintah membubarkan FPI sudah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan putusan MK Nomor 82 PUU 11 Tahun 2013.

### Struktur Skrip

**Table 2. 5W+1H Republika 30 Desember 2020**

Unsur yang Diamati: 5W+1H
<b>Temuan pada Teks:</b> <b>What</b> (Apa yang terjadi) Pemerintah secara resmi melarang aktivitas dan menghentikan kegiatan Front Pembela Islam (FPI).
<b>Who</b> (Siapa yang mengumumkan pembubaran FPI) Menkopolkukam Mahfud MD
<b>When</b> (Kapan pemerintah membubarkan FPI) Rabu 30 Desember 2020
<b>Where</b> (dimana pemerintah mengumumkan pembubaran FPI) Kantor Menkopolkukam
<b>Why</b> (kenapa pemerintah membubarkan FPI) Karena FPI tidak memiliki legal standing baik sebagai organisasi masyarakat maupun organisasi biasa. FPI secara <i>dejure</i> telah bubar karena belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT. FPI kerap melakukan aktivitas yang melanggar hukum seperti kekerasan, <i>sweeping</i> , dan provokasi.
<b>How</b> (Bagaimana langkah yang akan dilakukan pemerintah terkait pembubaran FPI) Pemerintah melarang aktivitas FPI. Pemerintah juga siap menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena tidak lagi mempunyai kedudukan hukum.

### Struktur Tematik

Detail dari berita ini, *Republika* terlihat berpihak pada pemerintah karena hanya menjelaskan alasan pembubaran FPI dari sisi pemerintah dan tidak menampilkan sisi dari FPI, sehingga pemberitaan *Republika* terlihat tidak berimbang.

Kata “dan” dalam kalimat merupakan koherensi penjelas yang menghubungkan proposisi pertama dan anak kalimat. Dengan pemilihan anak kalimat tersebut, *Republika* ingin menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya melarang aktivitas FPI, tetapi juga menghentikan seluruh kegiatan ormas FPI.

Bentuk kalimat yang digunakan dalam teks *Republika* diatas adalah bentuk deduksi. Bentuk deduksi menempatkan kalimat umum dibagian awal, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat khusus setelahnya.

Kata ganti yang digunakan menunjukkan latar belakang Mahfud MD, selain memiliki jabatan sebagai Menkopolkukam, Mahfud juga memiliki jabatan sebagai guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia.

### Struktur Retoris

**Table 3. Grafis Republika 30 Desember 2020**

Unsur yang Diamati: foto, kutipan bercetak tebal
Temuan pada Teks: Terdapat foto Mahfud MD, Dibawah foto terdapat tulisan “Pemerintah Bubarkan FPI dan Dilarang Beraktivitas”

*Republika* memberikan penekanan pada kalimat “Pemerintah Bubarkan FPI dan Dilarang Beraktivitas” yang ditulis tebal dibawah foto berita. Berdasarkan kalimat yang ditekankan oleh *Republika*, media ini terlihat bersikap netral terhadap keputusan pemerintah membubarkan FPI.

*Republika* tidak memasukkan opini dalam kalimat tersebut sehingga *Republika* terlihat ingin menginformasikan kepada khalayak bahwa pemerintah telah membubarkan FPI. Foto yang digunakan oleh *Republika* merupakan *spot* foto yang digunakan untuk melengkapi berita.

## 2. Analisis Berita 2, “FPI Dibubarkan, Pengamat: Pernyataan Menteri Bukan Hukum”, (30 Desember 2020)

### Struktur Sintaksis

Pemberian judul ini oleh *Republika* memberikan kesan bahwa semua pengamat menilai pernyataan menteri bukan hukum. Judul tersebut tidak menggunakan nama pengamat, melainkan pengamat itu sendiri dalam bentuk nominal.

*Lead* *Republika* menunjukkan terjadi pro-kontra di antara Menkopolkam Mahfud MD dengan pengamat hukum tata Negara, Margarito Kamis, mengenai pembubaran ormas FPI. Pernyataan keduanya digunakan untuk menunjukkan bahwa pandangan mereka mewakili perbedaan yang terdapat pada masyarakat dalam menyikapi pembubaran FPI.

Latar informasi yang ditampilkan pada pemberitaan ini mengenai surat keterangan terdaftar FPI yang telah habis sejak Juni 2019. *Republika* menggunakan latar informasi tersebut untuk menggiring pembaca bahwa pemerintah tidak memiliki dasar untuk membubarkan FPI.

Pada pemberitaan ini Margarito Kamis merupakan satu-satunya narasumber. *Republika* tidak memberi ruang untuk narasumber lain.

Pernyataan Margarito Kamis yang ditampilkan oleh *Republika* ingin menekankan bahwa meskipun sudah

dibubarkan FPI tetap bisa berkumpul, karena eksistensi sebuah organisasi masyarakat tidak ditentukan oleh daftar dan tidak terdaftar, tetapi oleh pengakuan masyarakat.

*Republika* menutup berita dengan mengutip pernyataan dari Margarito Kamis. Melalui pernyataan Margarito, *Republika* berusaha untuk mengonstruksi pandangan khalayak bahwa secara hukum tidak masalah jika FPI tidak mendaftar.

### Struktur Skrip

**Table 4. 5W+1H *Republika* 30 Desember 2020**

Unsur yang diamati: 5W+1H
<b>Temuan pada Teks:</b> <b>What</b> (Apa yang terjadi) Pengamat hukum tata negara mengatakan pernyataan menteri bukanlah hukum.
<b>Who</b> (Siapa yang mengatakan hal itu) Pengamat Hukum Tata Negara, Margito Kamis
<b>When</b> (Kapan ia mengatakan hal tersebut) Rabu, 30 Desember 2020
<b>Where</b> (Dimana ia mengatakan hal itu) Melalui sambungan telpon
<b>How</b> (Bagaimana eksistensi sebuah organisasi ditentukan) Eksistensi sebuah organisasi masyarakat tidak ditentukan oleh daftar dan tidak daftar, tetapi oleh pengakuan masyarakat. Sehingga meskipun FPI tidak mendaftar, tetap tidak bisa disebut sebagai organisasi ilegal.

### Struktur Tematik

Pada teks pemberitaan ini *Republika* menampilkan *detail* berdasarkan pernyataan Margarito Kamis yang tidak setuju dengan pembubaran FPI. *Republika* menampilkan seluruh *detail* dengan uraian yang panjang sehingga terlihat mempunyai acuan yang jelas.

Pada paragraf pertama *Republika* menggunakan koherensi pembeda. Kata “namun” pada kalimat diatas menunjukkan perbedaan pendapat antara Mahfud MD dengan pengamat hukum tata negara Margarito Kamis.

Bentuk kalimat *Republika* pada pemberitaan ini adalah aktif dan berpola induktif. *Republika* menggunakan kalimat aktif karena ingin menjadikan Mahfud MD dan Margarito Kamis sebagai subjek dari pernyataan.

Kata ganti pada teks berita *Republika* terdapat pada kutipan pernyataan Margarito. Disini terlihat bahwa Margarito menggunakan kata ganti “dia” untuk menunjuk kepada ormas FPI. Kata ganti “dia” dapat diartikan bahwa Margito sebagai pengamat hukum tata negara memisahkan diri dengan FPI.

Pada paragraf kedua yang merupakan kutipan dari Margarito Kamis terdapat kata “otoriter”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia daring, otoriter berarti berkuasa sendiri, sewenang-wenang. Dengan demikian makna yang ingin disampaikan oleh *Republika* adalah pemerintah berlaku sewenang-wenang jika apa yang keluar dari mulut pejabat dianggap sebagai hukum.

### Struktur Retoris

**Table 5. Gerafis *Republika* 30 Desember 2020**

Unsur yang Diamati: Foto, tulisan bercetak tebal dan font berbeda
Temuan pada Teks: Terdapat foto pakar hukum tata negara Margito Kamis sedang menatap kedepan dengan tatapan sinis.
Dibawah foto terdapat tulisan “Eksistensi sebuah organisasi masyarakat tidak ditentukan oleh daftar dan tidak terdaftar”. Tulisan tersebut dicetak tebal dan menggunakan font yang berbeda dengan teks berita

*Republika* sependapat dengan pengamat hukum tata negara yang mengatakan bahwa meskipun FPI tidak mendaftarkan, tetapi tetap tidak bisa disebut sebagai organisasi ilegal. Foto yang ditampilkan oleh *Republika* memberikan

kesan bahwa Margarito Kamis tidak suka atau tidak setuju dengan keputusan pemerintah membubarkan FPI.

### 3. Analisis Berita 3, “Persis: Pembubaran FPI Bernuansa Intimidasi Kelompok Oposisi”, (31 Desember 2020)

#### Struktur-Sintaksis

Dari judul tersebut terlihat *Republika* mencoba untuk menampilkan aspirasi dari ormas-ormas Islam yang beroposisi yakni Persis dan FPI.

Pada *lead* terlihat *Republika* ingin menjelaskan bahwa Persis sebagai ormas yang telah berdiri sejak lama bahkan sebelum Indonesia merdeka, tidak setuju dengan keputusan pemerintah membubarkan FPI.

Latar informasi *Republika* memberi kesan negatif pada pembubaran ormas tanpa peradilan, sehingga terlihat maksud *Republika* supaya pembaca berfikir bahwa pembubaran ormas tanpa peradilan berpotensi untuk merusak sistem demokrasi.

Dari kutipan narasumber, jelas terlihat keberpihakan *Republika* atas kasus pembubaran FPI. *Republika* hanya memberikan ruang untuk narasumber yang memang tidak menyetujui pembubaran FPI, yaitu Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis), Ustaz Jeje Zainudin.

Melalui pernyataan tersebut, *Republika* ingin menekankan kepada khalayak bahwa pemerintah belum memberikan contoh penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dari sini dapat terlihat bahwa *Republika* tidak setuju dengan pembubaran ormas FPI tanpa peradilan, tetapi juga tidak setuju dengan tindakan-



tindakan ormas yang mengganggu ketertiban dan perdamaian.

### Struktur Skrip

**Table 6. 5W+1H Republika 31 Desember 2020**

Unsur yang Diamati: 5W+1H
Temuan pada Teks: <b>What</b> (Apa yang terjadi) Pembubaran FPI dinilai berpotensi pendzaliman dan intimidasi kelompok oposisi
<b>Who</b> (Siapa yang mengatakan pembubaran FPI bernuansa intimidasi kelompok oposisi) Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) Ustaz Jeje Zainudin
<b>When</b> (Kapan PP Persis mengatakan hal itu) 31 Desember 2020
<b>Where</b> (Dimana PP Persis mengatakan hal itu) Dalam siaran pers
<b>Why</b> (Kenapa PP Persis mengatakan pembubaran FPI berpotensi pendzaliman) Karena pembubaran ormas tanpa peradilan berpotensi membunuh sistem demokrasi dan bernuansa intimidasi terhadap kelompok kritis yang beroposisi. Pasalnya, dalam saat yang berdekatan dengan peristiwa tewasnya eman pengawal Habieb Rizieq Shihab ditangan aparat.
<b>How</b> (Bagaimana seharusnya pemerintah bersikap terhadap ormas) Pemerintah berkewajiban melindungi, mengayomi dan membinanya. Sehingga bisa konstruktif bukan dengan cara membubarkan begitu saja.

### Struktur Tematik

*Republika* terlihat menyatakan sikap tidak menyetujui pembubaran ormas FPI pada pemberitaan ini karena seluruh detail dari 11 paragraf menjelaskan pandangan ormas Persis yang kontra atas pembubaran FPI.

Pada teks *Republika* terdapat kata “karenanya”. Kata tersebut termasuk kedalam jenis koherensi sebab-akibat. Pada paragraf sebelumnya, Jeje mengatakan penegakan hukum harus digunakan untuk terciptanya keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya bukan untuk membungkam kelompok kritis yang dipandang mengganggu kekuasaan.

Oleh karena itu, Jeje menegaskan, pemerintah berkewajiban membina dan memberi contoh kepada masyarakat dalam menciptakan kultur hukum yang kuat.

Bentuk kalimat *Republika* pada berita ini bersifat aktif dan berpola deduktif. *Republika* menggunakan kalimat aktif karena ingin menjadikan Jeje sebagai subjek dari pernyataan yang dibuat. Tema inti dari teks tersebut menjelaskan bahwa Jeje menilai pembubaran FPI dikhawatirkan ditafsirkan bernuansa intimidasi kelompok oposisi.

Kata ganti yang digunakan Wakil Ketua Umum PP Persis Ustaz Jeje Zainudin pada paragraf ketiga adalah kata ganti “kita”. Dalam pernyataan tersebut, kata ganti “kita” merefleksikan keseluruhan atau kelompok yang merepresentasikan sikap Jeje sebagai Individu dan sikap Persis sebagai Ormas Islam.

### Struktur Retoris

Pemilihan kata yang digunakan *Republika* ialah “Pendzaliman”. Dalam Al-Quran penggunaan kata zalim berarti melanggar hak orang lain. Makna kata pendzaliman yang digunakan *Republika* dari teks tersebut ditujukan terhadap sikap pemerintah yang membubarkan ormas tanpa peradilan. Dengan membubarkan FPI pemerintah berpotensi bersikap zalim terhadap ormas FPI.

**Table 7. Grafis Republika 31 Desember 2020**

Unsur yang diamati: Foto, penggunaan huruf tebal
Temuan pada teks: Foto Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) Jeje Zainudin sedang berbicara diatas mimbar. Dibawah foto terdapat tulisan bercetak tebal “menurut Ustaz Jeje Zainudin, cara pemerintah bubarkan FPI berpotensi pendzaliman”.

Foto tersebut merupakan foto *spot news* yang berfungsi sebagai pelengkap berita. Tulisan tersebut juga ditulis

menggunakan *font* yang berbeda dari teks berita sehingga terlihat mencolok. Dengan demikian *Republika* terlihat bersikap netral, karena teks yang ditampilkan mengutip pernyataan Jeje Zainudin tanpa memasukkan opini wartawan.

#### 4. Analisis Berita 4, “Soal FPI, Waketum MUI Singgung Sila ke-4 Pancasila”, (1 Januari 2021)

##### Struktur Sintaksis

Kata “singgung” yang digunakan oleh *Republika* seakan-akan menunjukkan bahwa MUI tidak setuju dengan pembubaran FPI dan mengkritik pemerintah secara halus.

Pemilihan kata tersebut oleh *Republika* menunjukkan MUI memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan FPI. Dalam hal tersebut jelas MUI menyatakan sikap tidak setuju dengan pembubaran FPI oleh pemerintah.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Republika* berusaha untuk mengkritik pembubaran FPI dengan menyandarkan diri kepada pendapat dari MUI.

Latar informasi yang ditampilkan mengenai isi sila ke-4 Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan begitu, *Republika* ingin menekankan bahwa pembubaran ormas FPI tidak sesuai dengan sila ke-4 Pancasila, karena seharusnya perlu ada dialog antara pemerintah dan FPI sebelum melakukan pembubaran.

Dalam pemberitaan *Republika* dapat dilihat bahwa hanya ada satu narasumber dalam teks berita tersebut. *Republika* hanya mengutip pernyataan dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.

Pernyataan yang ditampilkan oleh *Republika* ingin menegaskan bahwa musyawarah merupakan budaya Indonesia yang digunakan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Dengan mengutip sila ke-empat Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” membuat pernyataan Anwar terlihat semakin kuat karena mengacu pada dasar negara.

*Republika* menutup berita dengan mengutip pernyataan dari wakil ketua MUI yang menyatakan bahwa saat ini bangsa Indonesia tidak lagi menerapkan budaya musyawarah, tetapi lebih menonjolkan kepentingan politik.

##### Struktur Skrip

**Table 8. 5W+1H *Republika* 1 Januari 2021**

Unsur yang diamati: 5W+1H
<p>Temuan pada Teks:  <b>What</b> (Apa yang terjadi)  Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas memberikan tanggapan terkait pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI).</p>
<p><b>Who</b> (Siapa yang memberikan tanggapan)  Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.</p>
<p><b>When</b> (Kapan Anwar Abbas memberikan tanggapan)  Kamis, 31 Desember 2020</p>
<p><b>Why</b> (Kenapa perlu dilakukan musyawarah antara pemerintah dengan FPI)  Karena berkaitan dengan sila ke-4 pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.</p>
<p><b>How</b> (Bagaimana seharusnya perbedaan pendapat diselesaikan)  Seharusnya perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan bermusyawarah supaya bisa ditemukan pemufakatan.</p>

##### Struktur Tematik

*Republika* dengan jelas menyatakan sikap tidak menyetujui pembubaran FPI karena pada pemberitaan ini seluruh detail dari 9 paragraf

menjelaskan sikap wakil ketua MUI atas pembubaran FPI.

Dalam teks berita paragraf kelima terdapat koherensi sebab akibat. Kata “karena” pada kalimat tersebut menekankan pernyataan wakil ketua MUI kepada khalayak bahwa perlu ada dialog antara pemerintah dengan FPI sebelum dilakukan pembubaran. Dengan demikian, *Republika* ingin menekankan kepada khalayak bahwa perlu ada dialog antara pemerintah dan FPI sebelum membubarkan ormas tersebut.

Bentuk kalimat yang digunakan dalam teks berita *Republika* ini adalah bentuk deduksi. Dengan bentuk kalimat deduksi maka dapat terlihat aspek apa yang ingin ditonjolkan oleh *Republika*. Tema inti dari teks diatas menjelaskan mengenai wakil ketua MUI yang memberikan tanggapan terkait pembubaran ormas FPI.

Kata ganti yang digunakan oleh *Republika* ialah kata “mereka”. Kata mereka digunakan untuk menunjuk kepada politisi. Hal ini dapat diartikan bahwa *Republika* menilai bahwa sekarang ini yang diperjuangkan adalah kepentingan politisi bukan kepentingan bersama.

### Struktur Retoris

Penggunaan leksikon terdapat pada kata “lonceng kematian”. Makna lonceng kematian yang digunakan oleh *Republika* menjelaskan bahwa negara Indonesia harus berhati-hati karena sudah ada pertanda bahwa demokrasi di Indonesia akan mati.

Dengan demikian *Republika* ingin menyampaikan bahwa dengan tidak adanya musyawarah yang dilakukan oleh politisi dan masyarakat merupakan pertanda sistem demokrasi di Indonesia akan mati.

**Table 9. Grafis Republika 1 Januari 2021**

Unsur yang diamati: foto, tulisan dibawah foto
Terdapat foto Anwar Abbas, dibawah foto terdapat tulisan perbedaan pendapat diselesaikan dengan bermusyawarah supaya ditemukan permufakatan.

Penekanan ini dapat diartikan bahwa Waketum MUI menyarankan untuk melakukan musyawarah terhadap ormas yang berbeda pendapat dengan pemerintah bukan membubarkannya. Dengan kata lain, *Republika* mengkritik cara pemerintah membubarkan FPI.

### Sikap Kritis Republika

Berdasarkan analisis dari sampel berita di atas, terlihat sikap kritis *Republika* atas kebijakan pembubaran FPI yang dianggap sebagai kebijakan sewenang-wenang dan berpotensi menabrak norma demokrasi. *Republika* menggunakan argumentasi hukum dalam memberitakan pembubaran FPI karena dilakukan tanpa melalui proses peradilan.

Tiga dari empat berita yang dianalisis, *Republika.co.id* menilai cara pembubaran FPI menabrak prinsip dan norma kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Hal itu terlihat misalnya pada berita yang berjudul “*FPI Dibubarkan: Pengamat, Pernyataan Menteri Bukan Hukum*”.

Dalam konstruksinya, *Republika.co.id* melihat pengumuman pembubaran FPI yang disampaikan oleh Menkopolkam Mahfud MD bukanlah sebuah hukum, karena dalam sistem negara demokrasi, pernyataan seorang menteri bahkan presiden sekalipun itu bukanlah sebuah hukum. Maka pemerintah tidak dapat membubarkan FPI hanya dengan menggunakan pengumuman.

Dalam berita berjudul “*Persis: Pembubaran FPI Bernuansa Intimidasi kelompok Oposisi*” juga dapat terlihat perspektif hukum yang ingin dibangun oleh *Republika.co.id*.

Dalam pemberitaan tersebut, *Republika.co.id* melihat cara pemerintah membubarkan FPI bernuansa intimidasi, karena membubarkan ormas tanpa pengadilan berpotensi membunuh sistem demokrasi. *Republika* melihat pembubaran ormas seharusnya dilakukan melalui peradilan ataupun dialog terlebih dahulu.

Selanjutnya, pada berita berjudul “*Soal FPI, Waketum MUI Singgung Sila Ke-4 Pancasila*”, *Republika.co.id* melihat bahwa musyawarah seharusnya dikedepankan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, karena hal ini terkait dengan sila ke-empat Pancasila yang berbunyi “kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Oleh karena itu perlu adanya dialog antara pemerintah dengan pihak FPI sebelum terjadinya pembubaran.

Selain *Headline*/judul, perangkat *framing* yang penting untuk melihat pemaknaan berita yang ingin dikonstruksi kepada pembaca ialah pemilihan narasumber yang digunakan dalam sebuah berita.

Pada pemberitaan *Republika.co.id* tanggal 30, 31, Desember 2020 dan 1 Januari 2021, *Republika.co.id* hanya menggunakan pandangan dari pihak yang kontra dengan pembubaran FPI. Narasumber yang digunakan diantaranya Wakil Ketua Umum Persis, pengamat hukum tata negara, dan wakil ketua MUI.

Ketiga narasumber yang digunakan oleh *Republika* adalah tokoh yang selama ini dianggap kritis dan keras kepada pemerintah. Pemilihan terhadap tokoh yang selama ini berada di luar pemerintah

dan dikenal kritis menunjukkan sikap dan posisi *Republika* terhadap kebijakan pembubaran FPI.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis atas ke-empat berita di atas, terlihat *Republika* menampilkan kelengkapan unsur-unsur berita yang dibutuhkan untuk dianalisis seperti unsur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik secara lebih jelas.

Pada aspek struktur sintaksis, *Republika.co.id* menyusun fakta dengan mengutip pernyataan dari narasumber yang sesuai dengan sikap media. Tampak dari pemilihan narasumber, *Republika* menunjukkan sikap dan posisi yang kritis terhadap kebijakan pembubaran FPI.

Struktur skrip, *Republika.co.id* menampilkan fakta dengan menyajikan unsur 5W+1H secara lengkap. Struktur tematik, *Republika.co.id* menulis fakta dengan menggunakan detail, koherensi, dan kata ganti. Struktur retorik, *Republika.co.id* memberi penekanan fakta dengan menampilkan tulisan bercetak tebal dibawah foto berita.

*Republika* mbingkai pemberitaan dengan menggunakan perspektif hukum. *Republika.co.id* mengkritik cara pembubaran FPI yang dilakukan oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. *Republika.co.id* berpandangan bahwa seharusnya pembubaran ormas dilakukan melalui sistem peradilan bukan dengan cara langsung membubarkannya begitu saja tanpa melalui proses peradilan.

*Republika.co.id* sebagai media yang dibangun atas cita-cita para cendekiawan muslim untuk menyalurkan aspirasi komunitas muslim tetap berusaha menampung aspirasi komunitas muslim, meskipun saat ini kepemilikan sahamnya dipegang oleh Erick Tohir yang menjadi

bagian dari pemerintahan yang sedang berkuasa.

### Daftar Pustaka

Albito Anggito, Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Bungin, B. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Bungin, B. (2008). *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter Beter & Thomas Luckmann*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Company Profile, Pusat Data Harian Umum Republika

Eriyanto. (2012). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKis.

### Jurnal

Syaefudin, M. (2014). Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 34(2).

Launa, L. (2020). Robert Entman Framing Analysis Of Prabowo Subianto's Image In Republika. Co. Id March–April 2019 Edition. *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 3(1).

### Website:

Sindonews. (2021, Desember 30). Pembubaran FPI Dinilai Bertentangan dengan Prinsip

Negara Hukum.  
<https://nasional.sindonews.com/read/285728/13/pembubaran-fpi-dinilai-bertentangan-dengan-prinsip-negara-hukum-1609366320> diakses pada 25 Juni 2021

Sindonews. (2021, Januari 1). Pandangan PBNU Terkait Langkah Pemerintah Bubarkan FPI.  
<https://nasional.sindonews.com/read/287240/13/pandangan-pbnu-terkait-langkah-pemerintah-bubarkan-fpi-1609491714> diakses pada 19 Juli 2021 pukul 13.29 WIB

### Lain-lain:

Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S. 2012. *Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia)*. Laporan. Bermedia, Memberdayakan Masyarakat: Memahami kebijakan dan tata kelola media di Indonesia melalui kacamata hak warga negara. Riset kerjasama antara Centre for Innovation Policy and Governance dan HIVOS Kantor Regional Asia Tenggara, didanai oleh Ford Foundation. Jakarta: CIPG dan HIVOS.

Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional, Analisis Pemberitaan Media, Oktober 2016.

### Link Berita

<https://republika.co.id/berita/qm5263484/pemerintah-bubarkan-fpi-dan-dilarang-beraktivitas>

<https://www.republika.co.id/berita/qm5dd4396/fpi-dibubarkan-pengamat-pernyataan-menteri-bukan-hukum>

<https://www.republika.co.id/berita/qm6li4484/persis-pembubaran-fpi-bernuansa-intimidasi-kelompok-oposisi>

<https://www.republika.co.id/berita/qm8645396/soal-fpi-waketum-mui-singgung-sila-ke4-pancasila>